

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP)
TAHUN 2022**



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2023
Jl. Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang
Muara Sabak Barat



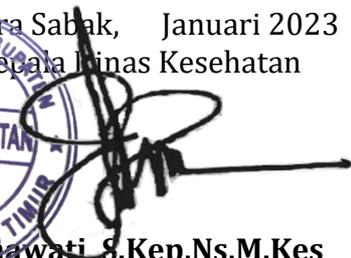
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami diberi kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka kesempurnaan penyusunan laporan ini ditahun mendatang.

Muara Sabak, Januari 2023
Kepala Dinas Kesehatan



Ernawati, S.Kep.Ns,M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690617 199502 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum Organisasi.....	2
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4 Struktur Organisasi.....	6
1.5 Sumber Daya Manusia.....	8
1.6 Sarana dan Prasarana.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.1.1 Visi.....	11
2.1.2 Misi.....	13
2.1.3 Tujuan.....	13
2.1.4 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	13
2.1.5 Program Kerja.....	14
2.1.6 Strategi dan Kebijakan.....	15
2.2 Penetapan Kinerja.....	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Indikator Kinerja.....	18
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	31
3.3 Strategi dan Pemecahan Masalah.....	36
BAB 4 PENUTUP.....	37



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	8
TABEL 2. Kualifikasi Tenaga Medis dan Non Medis Di Puskesmas Tahun 2022	9
TABEL 3. Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	9
TABEL 4. Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026	14
TABEL 5. Matrik Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2022	17
TABEL 6. Pengukuran Capaian Sasaran dan Indikator	19
TABEL 7. Pengukuran Capaian Program Dinas Kesehatan Tahun 2022	19
TABEL 8. Sasaran dan Indikator Utam Dinas Kesehatan Tahun 2022.....	24
TABEL 9. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022.....	25
TABEL 10 Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tahun 2022.....	26
TABEL 11 Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2022..	29
TABEL 12. Capaian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022.....	31
TABEL 13. Target dan Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2022.....	35
TABEL 14. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Dinas Kesehatan.....	36



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022 7



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022
- Lampiran 2 : Cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022
- Lampiran 3 : Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026
- Lampiran 4 : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022



BAB 1

PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program kerjanya mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang termasuk didalamnya fungsi dan tugas pokok serta rencana kerja ke dalam sebuah akuntabilitas yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangung Jabung Timur dalam bentuk pelaksanaan program dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022. Hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme dan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Penyusunan Laporan Kinerja sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

- 1) Sebagai laporan, Laporan Kinerja adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
- 2) Sebagai laporan akuntabilitas, laporan kinerja merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
- 3) Laporan Kinerja berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategi dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.
- 4) Laporan Kinerja merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
- 5) Laporan kinerja juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Komitmen pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur didalam pembangunan disampaikan melalui Visi “ **Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)**” yang dilengkapi dengan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD perubahan tahun 2021 – 2026. Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki prioritas dan komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga terwujudnya **Masyarakat Sehat Yang Produktif, Mandiri Dan Sejahtera**.

1.1. Dasar Hukum Organisasi

1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 12).

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kesehatan mempunyai peranan penting dalam mencapai target Visi dan Misi kepala daerah. Sektor kesehatan merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu pembangunan, baik itu pembangunan daerah maupun nasional. Dinas Kesehatan menjadi ujung tombak dalam menciptakan generasi yang sehat sehingga mampu mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri yang nantinya akan berimplikasi kepada majunya pembangunan daerah. Dinas Kesehatan harus mampu melakukan inovasi – inovasi yang mampu diterima masyarakat sehingga masyarakat mau merubah perilaku yang selama ini jauh dari pola hidup sehat.



Langkah strategis yang diambil Dinas Kesehatan tidak hanya bertumpu kepada manusia dan sumber penyakit, tetapi juga langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif sehingga penularan penyakit menular dapat dicegah dan penyakit tidak menular dapat ditekan dengan menerapkan terhadap pola hidup sehat. Upaya ini dituangkan dalam bentuk penyediaan program dan kegiatan yang dibagi dalam beberapa bidang yaitu bidang pelayanan kesehatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit. Pelaksanaan program kerja yang terbentuk dalam kegiatan ini mendapat dukungan dana yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dukungan dari APBN.

Program kerja lima tahun Dinas Kesehatan yang disusun berupa Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dalam 1 tahun. Rencana kerja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berpedoman terhadap rencana startegis dan rencana kerja yang telah ditetapkan maka Dinas Kesehatan juga memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam upaya startegis mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Beberapa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan saat ini sebagai berikut :

1. Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi.
2. Kualitas lingkungan masih rendah.
3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh baik gizi kurang maupun gizi lebih.
4. Penerapan prilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah.
5. Belum optimalnya capaian dan kualitas promosi kesehatan pada kelompok rentan
6. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal.
7. Kualitas SDM kesehatan masih rendah dan penyebaran yang tidak merata.



Untuk mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”**, maka segala upaya pembangunan yang dilaksanakan dalam membangun Daerah harus berimplikasi terhadap pencapaian kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan kedalam 4 misi utama yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan.
2. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan investasi daerah yang kompetitif dan lestari
4. Mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dan tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis.

Untuk melaksanakan visi misi kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Kesehatan sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran pokok pembangunan Kesehatan, yaitu :

1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan
3. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
5. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Bupati
9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan gizi masyarakat

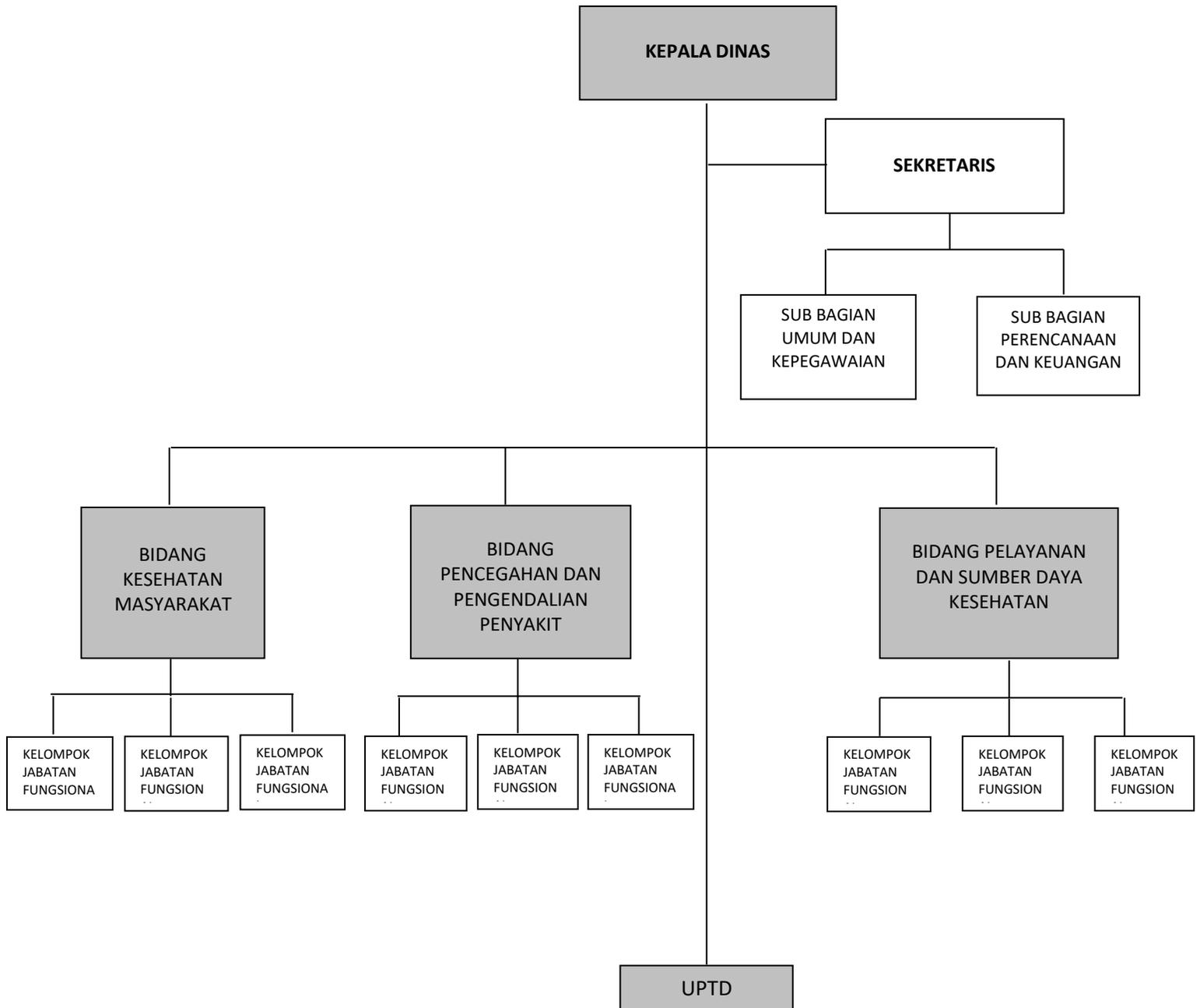
1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) UPTD



Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2022





1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan yang tersedia di Dinas Kesehatan terdiri dari berbagai ilmu pendidikan berlatar belakang kesehatan. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan memiliki 81 pegawai yang terdiri dari 7 pejabat struktural, 9 pegawai fungsional khusus, 29 pegawai fungsional umum, dan dibantu dengan 36 pegawai harian tidak tetap (PHTT).

Tabel -1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		PNS	PHTT		
1	S2 Kesehatan Masyarakat	2	1	3	3,71
2	S2 Non Kesehatan	2	0	2	2,47
3	Apoteker	3	0	3	3,71
4	Ners	0	4	4	4,94
5	S1 Kesehatan Masyarakat	22	9	31	38,27
6	S1 Non Kesehatan	2	3	5	6,17
7	DIV Kebidanan	0	2	2	2,47
8	DIII Keperawatan	2	4	6	7,41
9	DIII Kebidanan	1	1	2	2,47
10	DIII Farmasi	3	1	4	4,94
11	DIII Kes Lingkungan	2	1	3	3,71
12	DIII Gizi	1	0	1	1,23
13	DIII Analis Kesehatan	1	0	1	1,23
14	DIII Non Kesehatan	1	0	1	1,23
15	DI Non Kesehatan	0	1	1	1,23
16	SPPH	1	0	1	1,23
17	SMA	2	6	8	9,88
18	SMP	0	1	1	1,23
19	SD	0	2	2	2,47
TOTAL		45	36	81	100



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

Tenaga yang ada di 17 Puskesmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 947 orang terdiri dari tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga Nusantara Sehat dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) yang tersebar dipuskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes.

Tabel -2 :Kualifikasi Tenaga Medis dan Non Medis Di Puskesmas Tahun 2022

NO	KUALIFIKASI TENAGA DI PUSKESMAS	JUMLAH
1	Dokter Umum	30
2	Dokter Gigi	10
3	Apoteker	6
4	Perawat	222
5	Bidan	412
6	Perawat Gigi	27
7	Farmasi	18
8	Kesehatan Masyarakat	53
9	Kesehatan Lingkungan	27
10	Gizi	29
11	Analisis (Laboratorium)	29
12	Dukungan Manajemen	84
Total		947

1.6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas 18 (UPTD) yang terdiri dari 10 puskesmas perawatan, 7 puskesmas non perawatan dan 1 UPTD Instalasi Farmasi, 58 puskesmas pembantu, 31 polindes dan 23 poskesdes.

Tabel -3 : Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Puskesmas Rawat Inap	10
2	Puskesmas Non Rawat Inap	7
3	Puskesmas Pembantu	58
4	Polindes	31
5	Poskesdes	23
6	Instalasi Farmasi	1
7	Kendaraan roda 4 (ambulans)	20
8	Kendaraan Roda 2	257



1.7. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Aspek Startegis, dan Sistematika Penulisan
- Bab II : Penetapan Kinerja
Berisi Rencana Strategis, yang menjelaskan Visi, Misi dan Tujuan Rencana Startegis Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan, dan penjelasan Sasaran dan Program serta Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi analisa capaian dari program yang diukur dari Indikator Kinerja Utama disertai dengan penjelasan kendala atau permasalahan dan startegi yang dilakukan untuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
- Bab IV : Penutup
- Lampiran



BAB 2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Mengacu dari RPJMN 2020 – 2024, sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan yang tertuang di point kedua misi kepala daerah yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Berpedoman dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 yaitu “ **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**”. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjabarkan visi kepala daerah di bidang kesehatan yaitu menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan sejahtera. Melalui bidang kesehatan, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan memiliki kondisi lingkungan dan perilaku hidup yang sehat, memiliki kemandirian dalam pelayanan kesehatan sehingga menjadi manusia yang produktif dan sejahtera.



2.1.2. Misi

Dalam rangka terwujudnya visi kepala daerah, maka terdapat 4 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan.
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan dalam bidang kesehatan dititik beratkan pada prioritas pikiran misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama misi ke-2 yaitu: Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Misi ini ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mendukung misi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjabarkan misi kepala daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Meningkatkan keluarga sehat dan sadar gizi serta upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh Masyarakat.

2.1.3. Tujuan

Tujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penggerak pembangunan kesehatan menuju terwujudnya masyarakat yang sehat, Produktif, mandiri dan sejahtera adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat.

2.1.4. Sasaran dan Indikator Kinerja

Tercapainya sasaran rencana kerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 dapat diukur dari keberhasilan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut :



1. Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - a. Indeks keluarga sehat dari 0,20% pada tahun 2021 menjadi 0,70% pada tahun 2026
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - a. Indeks kepuasan masyarakat dari 89,25% pada tahun 2021 menjadi 89,50% pada tahun 2026
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator sasaran :
 - a. Predikat LAKIP dari CC pada tahun 2021 menjadi A pada tahun 2026
 - b. Laporan keuangan sesuai SAP dari sesuai pada tahun 2021 menjadi sesuai pada tahun 2026

2.1.5. Program Kerja

Untuk mencapai sasaran – sasaran tadi maka Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat
		2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota 3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 4. Program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman
		3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat 2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota



2.1.6. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan merupakan penguatan yang diambil sebagai langkah untuk mencapai target capaian dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti yang telah dijabarkan di atas tentang strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan diambil dengan melihat permasalahan yang ada di masyarakat yang kemudian di indentifikasi melalui review pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Adapun arah kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah :

1. Penguatan pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup
2. Melakukan percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan uapay pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan
5. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan
6. Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1) Peningkatan kesehatan masyarakat

Sasaran peningkatan kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui strategi :

- a. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dilaksanakan melalui strategi :

- a. Meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi



sesuai standar

- b. Meningkatkan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan
- c. Meningkatkan fasilitas kefarmasian, alat kesehatan dan makanan sesuai standar

3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui strategi :

- a. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
- b. Peningkatan kualitas dan tata Kelola keuangan dan pelaporan
- c. Penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

2.2. Penetapan Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini, di tahun 2022 telah disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja dalam perjanjian kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome dan output.

Penyusunan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :



Tabel 5
Matrik Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Indeks keluarga sehat	%	0,30	1. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	23.476.497.424 179.454.836
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat	%	89,30	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota 3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 4. Program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	48.000.240 341.256.750 29.006.464.085 131.374.000
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Predikat AKIP 2. Laporan keuangan sesuai SAP	Predikat	B Sesuai	1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota 2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	53.336.584.791 1.191.529.912



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian pelaksanaan program kerja Dinas Kesehatan tahun 2022 dilihat dari presentase realisasi dari target yang telah ditetapkan sudah cukup baik. Dinilai dari akuntabilitas kinerja yang mengacu pada Perjanjian kinerja tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen Dinas Kesehatan dalam ikut mendukung Visi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2022, merupakan langkah awal dalam penilaian indikator kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan OPD di lingkungannya. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja tiap kegiatan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja mulai dari indikator capaian program sampai ke indikator hasil. Pengukuran hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 6
Pengukuran Capaian Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN					% CAPAIAN TARGET
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Faskes dan RS	Angka Harapan Hidup	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		tahun	66,75	66,34	99,38%
					Indeks Keluarga Sehat	%	0,30	0,285
2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	Indeks pelayanan publik			%	2,9	0,21	7,24%
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,30	93,39	100%
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat AKIP	predikat	B	TMB	0%
				Laporan Keuangan Sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	100%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA INSTANSI								67,0

Tabel 7
Pengukuran Capaian Program/Kegiatan dan Indikator Program/Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	89,3%	96,54%	100%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	100%	100%	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	2	2	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	1	100%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	12	100%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	96,23%	96,23%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	85	85	100%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.3.2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	45	70	100%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100%	100%	100%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan (Jenis)	9	9	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100%
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	1	1	100%
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang - Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	12	12	100%
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12	12	100%
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12	12	100%
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2 dan Roda-4 (Unit)	2	2	100%
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	5	5	100%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100%	100%	100%
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)	12	12	100%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	20	18	90%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	JUMLAH KEMATIAN IBU,	6	5	100%
		ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1000 KELAHIRAN HIDUP (KH),	18	19,02	94,64%
		ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1000 KELAHIRAN HIDUP	19	20,42	93,05%
		ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP	20	20,42	97,94%
		PERSENTASE PELAYANAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	80	70,13	87,66%
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%
2.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	5 Paket	3 Paket	60%
2.1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di FKTP	17 Paket	9 Paket	52,94%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.1.3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	306 Unit	115 Unit	37,58%
2.1.5	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	200 Item	200 Item	100%
2.1.6	Pengadaan Bahan Pakai Habis	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	45 Item	45 Item	100%
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	88,04%	88,04%
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%	70,13%	70,13%
		Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	91,86%	91,86%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	64,10%	64,10%
		Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	74,24%	74,24%
		Persentase Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	21,23%	21,23%
		Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	80,02%	80,02%
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	18,56%	18,56%
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	113,31%	100%
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	94,30%	94,30%
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	56,19%	56,19%
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	49,34%	49,34%
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	7,11	2,42	100%
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	3,20	2,08	100%
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada balita	18,05	5,30	100%
		Persentase Desa UCI/ Kelurahan UCI	93,50	90,32	96,60%
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	94,30	99,26	100%		



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
		Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok	73	50,77	69,55
		Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	70	69,03	98,61
		Cakupan Desa Terhadap Sanitasi Layak	73	75,84	100%
		Persentase Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksekutif	64	53,54	83,65
		Jumlah Posyandu Aktif	229	268	100%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100	25,97%	25,97%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	5,5	6,57	100%
		Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS	75	75	100%
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	3998	3520	88,04%
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	3817	2677	70,13%
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	3835	3523	91,86%
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	17.524	11.233	64,10%
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	33.955	25.209	74,24%
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	153.961	32.688	21,23%
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	24.906	19.931	80,02%
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	56.879	10.610	18,65%
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	894	1.013	113,31%
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	421	397	94,30%
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	1059	595	56,19%
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	5803	2863	49,34%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	1	100%
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	4	100%
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	1	100%
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	100%
2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	100%
2.2.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	1	100%
2.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45	0	0
2.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	100%
2.2.21	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengelolaan Kesehatan Khusus	3	3	100%
2.2.22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	100%
		Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD	100	100	100%
		Persentase Anggota Keluarga Tidak ada yang Merokok	73	50,77	69,55%
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	97	115,8	100%
		Jumlah Obesitas yang ditangani	14.744	3.833	26,0%
2.2.23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan	1	1	100%
2.2.24	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18 Unit	13 Unit	72,22%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	70%	60%	85,71%
		JUMLAH PUSKESMAS DENGAN 9 JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	10	6	60%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota.	Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	80%	86,01%	100%
3.1.1	Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	100%
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota :	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	47,06	35,29	74,98%
3.2.1	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	2	100%
3.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	211	127	60,18%
3.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	100%
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	56,60	55,90	98,76%
3.3.1	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	265	248	93,58%
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS	100%	100%	100%
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek dan Toko Obat yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	100%	100%	100%
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	1	100%
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang bersertifikat/ memiliki izin Produksi	35,94	35,93	99,97%
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	1	100%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dimasyarakat	24	23,95	99,79%
4.3.1	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50	50	100%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS	50,55%	53,0%	100%
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Hasil Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan	6	7	100%
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100%
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kegiatan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	6	7	100%
5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1	100%
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	78,97	100	100%
5.3.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Program					89,49

Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 maka terdapat 4 indikator dari 3 sasaran yang telah ditetapkan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi. Dalam analisis dijelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis atas capaian kinerja masing-masing sasaran di atas sebagaimana dijelaskan dibawah ini.



Tabel 8
Sasaran dan Indikator Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022	
					Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Faskes dan RS	Usia harapan hidup			66,75 thn	66,34 thn
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,30%	0,285%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	Indeks pelayanan publik			2,9%	0,21%
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,30%	93,39%
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat AKIP	B	TMB
				Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai

1) Sasaran Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Indikator keberhasilan sasaran dilihat dari perbandingan target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Indeks keluarga sehat	%	0,30	0,285	95,0%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 1 indikator kinerja yang ada, sudah mencapai target yaitu 0,285% dengan capaian kinerja 95,0%. Hal ini dikarenakan oleh program dan kegiatan yang dilakukan di puskesmas dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS). Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan intervensi terhadap keluarga-keluarga yang memiliki masalah kesehatan sesuai dengan indikator PIS-PK dan Standar Pelayanan Minimal. Sasaran ini dicapai melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor.



Dana yang ditargetkan untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 23.655.952.260,- dengan realisasi Rp. 19.408.833.112,- (82,05%).

Keberhasilan sasaran ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.476.497.424,- dan realisasi sebesar Rp. 19.234.038.412,- (81,93%) dengan kegiatan :
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
 - 13) Pengeloaan pelayanan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana
 - 14) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - 15) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - 16) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - 17) Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - 18) Pengelolaan surveilens kesehatan
 - 19) Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAFZA
 - 20) Pengelolaan upaya kesehatan khusus
 - 21) Pengelolaan upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan



- 22) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 179.454.836,- dan realisasi sebesar Rp. 174.794.700,- (97,40%) dengan kegiatan :
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
1	Indeks kepuasan masyarakat	%	89,30	93,39	105%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat satu indikator kinerja telah mencapai target yaitu sebesar 93,39% dengan capaian kinerja 105% (\geq 100%). Hal ini dapat tercapai didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana di seluruh puskesmas, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan melalui pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan melalui nusantara sehat dan pengangkatan tenaga honorer. Pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai di puskesmas melalui pengadaan dari APBD, DAK ataupun droping dari pusat. Dengan terpenuhinya ini tentunya puskesmas dapat melaksanakan pelayanan baik di dalam maupun di luar gedung kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dana yang ditargetkan untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 29.527.095.075,- dengan realisasi Rp. 27.573.633.699,- (93,38%).

Keberhasilan sasaran ini ditunjang oleh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :



- a. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 341.256.750,- dan realisasi sebesar Rp. 335.533.042,- (98,32%) dengan kegiatan :
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.006.464.085,- dan realisasi sebesar Rp. 27.061.214.026,- (93,29%) dengan kegiatan :
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 2) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - 3) Pengadaan obat, vaksin
 - 4) Pengadaan bahan pakai habis
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - 2) Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 3) Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
 - 4) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.000.240,- dan realisasi sebesar Rp. 47.622.631,- (99,21%) dengan kegiatan :
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya Manusia Kesehatan



- 2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan
 - Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis sumber daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 131.374.000,- dan realisasi sebesar Rp. 129.264.000,- (98,39%) dengan kegiatan :
 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan, Minuman Industri Rumah Tangga, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan

3) Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :



Tabel 11
Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN TARGET
1	Predikat AKIP	predikat	B	TMB	0%
2	Laporan Keuangan sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator kinerja yang ada, dimana penjelasan dari masing-masing indikator sebagai berikut :

- 1) Predikat AKIP pada tahun 2022 mendapat nilai TMB dari penilaian Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada bidang sekretariat dinas kesehatan yang mana tidak adanya petugas khusus yang bertugas membuat laporan SAKIP, sehingga membuat kelalaian dalam pengumpulan dokumen SAKIP kepada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Laporan Keuangan sesuai SAP pada tahun 2022 dilihat pada tabel di atas telah mencapai target yaitu sesuai (100%). Kesesuaian Laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Kesehatan telah mengikuti aturan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut : penyusunan neraca awal, jurnal balik, identifikasi transaksi dan jurnal, posting ke buku besar, penyajian neraca jalur dan penyajian laporan keuangan.

Dana yang ditargetkan untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 54.528.114.703,- dengan realisasi Rp. 52.398.190.039,- (96,09%).

Keberhasilan sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 53.336.584.791,- dan realisasi sebesar Rp. 51.294.618.339,- (96,17%) dengan kegiatan :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN



- 2) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan komponene instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi kunjungan tamu
 - 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.191.529.912,- dan realisasi sebesar Rp. 1.103.571.700,- (92,62%) dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan



3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2022 dana APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 12
Capaian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53,677,841,541	51,630,151,381	2,047,690,160	96,19
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,666,599,400	768,656,079	897,943,321	46,12
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1,666,599,400	768,656,079	897,943,321	46,12
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49,230,746,803	48,185,014,887	1,045,731,916	97,88
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	46,300,153,363	45,337,176,967	962,976,396	97,92
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	2,930,593,440	2,847,837,920	82,755,520	97,18
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	376,296,750	366,818,042	9,478,708	97,48
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25,500,000	23,630,000	1,870,000	92,67
1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9,540,000	7,655,000	1,885,000	80,24
1.3.3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	341,256,750	335,533,042	5,723,708	98,32
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	216,629,823	216,144,804	485,019	99,78
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	35,108,811	35,074,921	33,890	99,90
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	59,628,012	59,476,400	151,612	99,75
1.4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,797,000	31,797,000	0	100,00
1.4.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	9,000,000	9,000,000	0	100,00
1.4.5	Fasilitasi kunjungan tamu	3,072,000	2,925,000	147,000	95,21
1.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	78,024,000	77,871,483	152,517	99,80
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,231,560,165	1,189,318,600	42,241,565	96,57
1.5.1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1,061,630,000	1,020,727,800	40,902,200	96,15
1.5.2	Pengadaan Mebel	62,050,000	61,850,000	200,000	99,68
1.5.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	107,880,165	106,740,800	1,139,365	98,94



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162,400,000	160,047,736	2,352,264	98,55
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	162,400,000	160,047,736	2,352,264	98,55
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	793,608,600	744,151,233	49,457,367	93,77
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	260,950,000	211,542,133	49,407,867	81,07
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,460,000	1,460,000	0	100,00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	531,198,600	531,149,100	49,500	99,99
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT	53,674,491,421	47,398,824,138	6,275,667,283	88,31
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :	10,030,492,280	9,835,778,888	194,713,392	98,06
2.1.1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,573,228,280	3,469,109,021	104,119,259	97,09
2.1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,000,000,000	3,950,000,000	50,000,000	98,75
2.1.3	Pengadaan Obat, Vaksin	1,471,920,720	1,431,587,257	40,333,463	97,26
2.1.4	Pengadaan Bahan Pakai Habis	985,343,280	985,082,610	260,670	99,97
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :	42,452,469,229	36,459,473,550	5,992,995,679	85,88
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,430,311,672	1,207,052,550	223,259,122	84,39
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	684,726,645	522,782,199	161,944,446	17,35
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	275,417,830	193,409,800	82,008,030	70,22
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2,593,433,139	2,464,298,152	129,134,987	95,02
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,043,874,268	899,445,897	144,428,371	86,16
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,090,094,059	1,045,509,200	44,584,859	95,91
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	826,770,768	769,527,400	57,243,368	93,08
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	184,596,065	179,762,000	4,834,065	97,38
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	203,251,111	190,766,400	12,484,711	93,86
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	326,000,160	230,314,000	95,686,160	70,65
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	660,466,352	529,444,102	131,022,250	80,16
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	356,809,306	213,890,500	142,918,806	59,95
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan atau berpotensi bencana	5,757,904,000	3,931,538,750	1,826,365,250	68,28
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,510,020,702	1,323,964,748	186,055,954	87,68



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11,591,800	11,591,000	800	99,99
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	919,080,623	758,665,900	160,414,723	82,55
2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,253,642,840	1,069,220,740	184,422,100	85,29
2.2.18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	890,516,612	742,465,800	148,050,812	83,37
2.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	74,607,000	72,852,000	1,755,000	97,65
2.2.20	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	982,362,684	846,111,404	136,251,280	86,13
2.2.21	Pengelola Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	300,630,000	172,090,000	128,540,000	57,24
2.2.22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,100,389,788	1,859,335,870	241,053,918	88,52
2.2.23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5,663,876,390	5,521,328,000	142,548,390	97,48
2.2.24	Operasional Pelayanan Puskesmas	11,946,884,542	11,069,288,420	877,596,122	92,65
2.2.25	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	683,877,273	585,456,718	98,420,555	85,61
2.2.26	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	681,333,600	49,362,000	631,971,600	7,24
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1,191,529,912	1,103,571,700	87,958,212	92,62
2.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	970,856,996	906,072,300	64,784,696	93,33
2.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	220,672,916	197,499,400	23,173,516	89,50
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	48,000,240	47,622,631	377,609	99,21
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota	5,900,000	5,830,000	70,000	98,81
3.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	5,900,000	5,830,000	70,000	98,81
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pemandayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	39,118,028	38,810,831	307,197	99,21
3.2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22,879,028	22,882,700	95,328	99,59
3.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	10,740,000	10,528,131	211,869	98,03
3.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,400,000	5,400,000	0	100,00
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,982,212	2,981,800	412	99,9
3.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,982,212	2,981,800	412	99,9
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	131,374,000	129,264,000	2,110,000	98,39



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,635,000	20,305,000	330,000	98,40
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,635,000	20,305,000	330,000	98,40
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	45,000,000	43,365,000	1,635,000	96,37
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	45,000,000	43,365,000	1,635,000	96,37
4.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	65,739,000	65,594,000	145,000	99,78
4.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	65,739,000	65,594,000	145,000	99,78
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	179,454,836	174,794,700	4,660,136	97,40
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62,663,228	62,462,700	200,528	99,68
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	62,663,228	62,462,700	200,528	99,68
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116,791,608	112,332,000	4,459,608	96,18
5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	116,791,608	112,332,000	4,459,608	96,18
	Jumlah	107,711,162,038	99,380,656,850	8,330,505,188	92,27

Tabel 13
Target dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1	BELANJA OPERASI	98.194.015.546	90.105.113.929	91,76
2	BELANJA MODAL	9.517.146.492	9.275.542.921	97,46
	TOTAL BELANJA	107.711.162.038	99.380.656.850	92,27



Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anggaran Dinas Kesehatan sebesar **Rp 107.711.162.038,-** dengan realisasi sebesar **Rp 99.380.656.850,-** Dari sisi penilaian efisiensi, Dinas Kesehatan menunjukkan efisiensi yang tinggi mengingat capaian kinerja yang diperolehnya. Dimana penyerapan anggaran total sebesar 92,27% dengan pencapaian kinerja sudah baik mencapai 89,49%. Pencapaian indikator sasaran, program dan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran.

3.3 Strategi dan Pemecahan Masalah

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 beserta strategi pemecahan masalah, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 14.
Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Permasalahan	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih tingginya angka kematian ibu (AKI)	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan alat kesehatan (USG) untuk pemeriksaan ibu hamil• Peningkatan sarana dan prasarana akses rujukan• Pemenuhan SDM kesehatan khususnya tenaga dokter spesialis obstetri genikologi• Peningkatan kompetensi nakes (bidan) melalui program magang dan pelatihan• Memperkuat peran serta lintas program lintas sektor terhadap hasil pelaksanaan audit maternal perinatal (AMP)
2	Masih tingginya persentase merokok dalam keluarga	Peningkatan Pemahaman tentang bahaya merokok dikalangan keluarga
3	Masih rendahnya persentase Balita 0-6 bulan mendapatkan Asi Eksklusif	Peningkatan pemahaman tentang Asi Eksklusif pada masyarakat khususnya ibu hamil dan menyusui



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022

No	Permasalahan	Strategi Pemecahan Masalah
4	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sesuai dengan harapan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemahaman secara menyeluruh terhadap tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019• Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM• Peningkatan peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten
5	Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan sarpras dan alkes diusulkan melalui dana DAK, APBD, atau pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku• Meningkatkan pemanfaatan aplikasi aspak dengan selalu melakukan updating data• Melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan secara berkala
6	9 jenis tenaga kesehatan belum terpenuhi untuk 17 puskesmas	Pemenuhan 9 jenis tenaga diusulkan melalui program nusantara sehat, rekrutmen nakes dengan pemanfaatan dana DAK non fisik melalui pembiayaan BOK Puskesmas, serta dana APBD



BAB 4 PENUTUP

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 secara umum 89,49%. Sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 – 2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 5 (lima) program yang mendukung tercapainya indikator sasaran dan capaian kinerja Dinas Kesehatan.

Dari angka pencapaian kinerja tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tujuan menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia aparatur, sedangkan lingkup eksternal mencakup sikap masyarakat yang masih rendah pengetahuannya terhadap kesehatan, sehingga dapat dikatakan bahwa angka- angka tersebut cukup memberikan kebanggaan kepada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak dilingkup organisasi Dinas Kesehatan. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang.